BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbicara mengenai kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Indonesia rasanya masih jauh dari kata sempurna karena nyatanya masih banyak masyarakat di Indonesia mengalami yang namanya kemiskinan, terutama yang hidup di daerah-daerah terpencil seperti di pedesaan yang kebanyakan dari orang-orang yang tidak di pedesaan merupakan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah. Masyarakat di pedesaan masih banyak yang bekerja sebagai buruh tani sehingga penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak sedikit juga ada yang tidak bekerja sehingga inilah yang menjadi indikator masyarakat di desa perekonomiannya masih rendah.

Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin, baru ini merupakan masalah sosial yang penting untuk diatasi. Jumlah siswa yang putus sekolah meningkat tajam disaat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan. Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memprihatinkan. Kenyataan ini harus diantisipasi untuk menghindari terdapatnya “generasi yang hilang” beberapa dasawarsa mendatang.¹ Kesejahteraan sosial bagi masyarakat melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka dan dapat hidup dengan layak serta

¹ Ibnu Syamsi, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 11.

bermartabat. Ini akan melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan keadilan.

Kunci dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat memiliki unsur-unsur yang harus diselenggarakan yakni:² Kesejahteraan ekonomi yaitu untuk memastikan adanya pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup bagi semua orang, serta sistem redistribusi kekayaan yang adil. Pendidikan yaitu untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk belajar dan berkembang. Kesehatan yaitu untuk menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta promosi kesehatan yaitu untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesejahteraan. Perlindungan sosial yaitu untuk menyediakan jaringan perlindungan sosial seperti program bantuan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan. Keadilan sosial yaitu untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara dalam masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, dan ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang baik, dan terbinanya

² Suradi, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Informasi* (Vol. 17 No. 03 2012), 147.

kesempatan untuk melaksanakan kewajiban dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.³ Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya yang mencakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Pemerintah sebagai pemegang kendali di negara ini harus menyusun program yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, program yang dimaksud ialah program yang bisa untuk meminimalisir dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Program tersebut harus disusun dengan baik sehingga pengimplementasiannya bisa terlaksana dengan baik pula dan tentunya tepat sasaran serta adil dalam memberikan bantuan dari program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Tepat sasaran, adil disini maksudnya penyaluran ataupun pengimplementasian program yang dimaksud bisa tepat sasaran kepada orang yang betul-betul membutuhkan sehingga program tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar bukan malah diberikan kepada orang-orang yang bisa dikategorikan perekonomiannya menengah keatas. Oleh sebab itu, program yang disusun dan diimplementasikan nantinya berupa bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti bantuan pangan, bantuan sosial dan lain sebagainya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang sudah ditetapkan

³ Fonny Waani, "Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Benbanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Singihe", *Jurnal Eksekutif* (Vol. 1 No. 1 2021), 4.

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 pemerintah sudah melaksanakan PKH sebagai salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan, PKH sudah terbukti berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara berkembang terutama masalah kemiskinan kronis.⁴

Sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat PKH memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan disekitarnya terutama ibu mengandung dan anak. Manfaat PKH juga mulai diberlakukan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH keluarga miskin diarahkan untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer. Secara berkelanjutan PKH diarahkan untuk menjadi pusat keunggulan dan penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁵

Sasaran PKH adalah keluarga miskin yang memiliki berbagai komponen dalam kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan juga terdaftar sebagai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Penerima PKH harus sudah terdaftar dan turut hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Keluarga yang sudah terdaftar sebagai Keluarga

⁴ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 1.

⁵ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, 4.

Penerima Manfaat PKH memiliki kewajiban di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, melakukan imunisasi dan timbang badan bagi anak balita dan anak prasekolah serta pemenuhan gizi yang lengkap. Sedangkan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki kewajiban dalam bidang pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota PKH ke fasilitas pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesehatan yaitu untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.⁶

Alasan peneliti mengangkat judul ini karena di Desa Larangan Luar diterapkan mengenai implementasi asas keadilan pada pemberian bantuan PKH desa bagi masyarakat melalui berbagai macam cara dan ketentuan yang berlaku serta diperjelas oleh Ibu Sitti Umamah selaku Pamong di Dusun Bicabbi 2 Desa Larangan Luar beliau menyatakan bahwasanya:

“Program PKH (Program Keluarga Harapan) ini sudah berlangsung dan dilaksanakan sejak lama tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang memang betul-betul dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu atau bisa dikatakan perekonomiannya menengah kebawah, nah program ini sangat bagus untuk diadakan oleh pemerintah karena memang membantu sekali perekonomian masyarakat yang kurang mampu apalagi di desa yang kebanyakan perekonomiannya menengah kebawah. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program PKH ini karena untuk menambah pemasukan bagi kebutuhan sehari-hari mereka dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya penting untuk dipenuhi.”⁷

Menyikapi dari yang beliau sampaikan mengenai implementasi pemberian bantuan PKH bagi masyarakat sangat cocok dan bagus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sebab sudah ada

⁶ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, 6.

⁷ Sitti Umamah, Wawancara Langsung, Pamekasan Kamis 25 April 2024.

pengimplementasian dari program tersebut dan bisa dijadikan acuan maupun patokan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang menjadi masalah utama di setiap negara berkembang. Namun yang menjadi persoalan dalam pengimplementasian program PKH ini berupa tepat sasaran atau tidaknya pemerintah untuk memberikan bantuan tersebut, jangan sampai orang ataupun keluarga yang betul-betul membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan PKH ini dan malah orang ataupun keluarga yang perekonomiannya menengah keatas yang mendapatkan bantuan PKH.

Kenyataannya dalam penyaluran PKH ini ada beberapa masalah yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah, contohnya ada sebuah keluarga menerima bantuan PKH akan tetapi keluarga tersebut perekonomiannya menengah keatas dan bisa dikatakan mampu. Ada keluarga yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan PKH ini tapi malah tidak mendapatkan bantuan tersebut ataupun namanya tidak tercantum di dalam data penerima PKH. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang keadilan dari penyaluran PKH tersebut agar program bantuan PKH ini bisa didistribusikan kepada keluarga yang memang betul-betul membutuhkan bantuan PKH bukan malah didistribusikan kepada keluarga yang perekonomiannya menengah keatas dan tentunya berlandaskan peraturan dan persyaratan penerima PKH.

Mengacu pada Undang-Undang No. 13 pasal 3 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menyatakan tujuan penanganan kemiskinan yakni berupa penyaluran bantuan sosial serta peraturan presiden No. 63 pasal 2 tahun 2017 menyatakan bahwa PKH merupakan program yang ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, namun dalam penyalurannya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut yang masih kurang baik sehingga inilah yang menjadi prolem dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk bisa menjadi wadah dari setiap pengimplementasian program PKH yang dicanangkan untuk keluarga yang betul-betul membutuhkan bantuan PKH tersebut, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah yang menyalurkan bantuan tersebut terutama yang ada di desa yang lebih tahu mana yang harus diberikan bantuan PKH tersebut dan mana yang tidak. Peneliti begitu tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Asas Keadilan terkait Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Setiap penelitian perlu ada sebuah fokus penelitian yang memberikan sebuah arah sehingga nampak jelas yang akan diteliti dan akan dicapai sesudah penelitian ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Keadilan pada Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan sebab tujuan merupakan bagian penting dalam sebuah pekerjaan yang harus dicapai, maka dari itu diperlukan sebuah usaha

a untuk terciptanya sebuah tujuan tersebut. Begitu pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Implementasi Asas Keadilan pada Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Mendeskripsikan Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa bagi Masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, diharapkan hasil daripada penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini bertujuan untuk menyumbang hasil karya ilmiah. Kemudian penelitian ini juga bisa menjadi bahan kajian terhadap implementasi asas keadilan pada pemberian bantuan dana program keluarga harapan (PKH) bagi masyarakat serta penelitian ini bisa

menjadi bahan acuan, sumbangan pengetahuan, dan wawasan yang luas bagi pembaca mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah kerangka berpikir mahasiswa dan bisa bermanfaat serta menjadi suatu sumber pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menjadi sebuah referensi khususnya untuk keperluan perkuliahan serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bagi Kepala Desa

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan ataupun patokan agar lebih mengedepankan pelaksanaan asas keadilan mengenai pemberian bantuan dana yang betul-betul diperuntukkan bagi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan asas keadilan mengenai pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi masyarakat.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi asas keadilan pada pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi

motivasi dan tolak ukur agar penelitian yang akan dilakukan selanjutnya bisa terealisasi dengan baik.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang menurut peneliti perlu kiranya untuk dijelaskan secara lebih terperinci sehingga tidak tercipta kesalahan dalam penafsiran. Berikut ini beberapa istilah yang dimaksud:

1. Implementasi

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat yang berupa undang-undang, peraturan penerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁸

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah prinsip moral dan etis yang mendasari pemahaman dan pelaksanaan hukum yang adil, konsep keadilan memiliki kaitan erat dengan konsep kesetaraan, kebijaksanaan dan kebenaran.⁹

3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang membutuhkan yang mana bertujuan untuk

⁸ Dewi Yuni Lestari, Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Transparansi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 7 No. 1, 2020), 184.

⁹ Sofyan Mei Utami, Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim dalam Memutuskan Putusan Perceraian, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* (Vol. 4 No. 2 2023), 105.

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas dalam mensejahterakan masyarakat.¹⁰

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang lain. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat membandingkan letak persamaan dan perbedaan karya ilmiah orang lain dengan karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan tema diatas, maka terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan perlu dijabarkan antara lain yaitu:

Risnawati (2021), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam perspektif hukum islam”. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Letak persamaannya yaitu

¹⁰ <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf>, diakses pada sabtu 25 Mei 2024 pukul 06.00 WIB

¹¹ Yusuf Murah, Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Investasi Sosial, *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani* Vol. 4 2016), 121.

Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan berupa program keluarga harapan (PKH) untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya Pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada bagaimana implementasi, faktor penghambat dan maqashid syariah pada pemberian bantuan dana program keluarga harapan. Sedangkan penelitian sekarang lebih kepada mekanisme pemberian bantuan dan mendeskripsikan aspek keadilan pada pemberian bantuan dana PKH.

Riza Pani (2023), mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menurut Ekonomi Syariah”. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Letak persamannya yaitu Sama-sama ingin mendeskripsikan tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya terletak Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Rika Wati (2020), mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan Judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus: Desa Muara Batu-Batu

Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam”. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan indikator penelitian model pendekatan implementasi kebijakan George C. Edward III. Letak persamaannya yaitu Sama-sama ingin mendeskripsikan tentang implementasi Program Keluarga Harapan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya yaitu Pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada pelaksanaan dan hambatan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan pada penelitian sekarang lebih berfokus pada mekanisme dan aspek keadilan pada pemberian bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Risnawati, <i>Implementasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan (PKH) bagi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam perspektif hukum islam (studi kasus desa pekendekan kecamatan sabbang kabupaten lawu utara),</i> Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan berupa program keluarga harapan (PKH) untuk kesejahteraan sosial masyarakat.	Pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada bagaimana implementasi, faktor penghambat dan maqashid syariah pada pemberian bantuan dana program keluarga harapan. Sedangkan penelitian sekarang lebih kepada mekanisme pemberian bantuan dan mendeskripsikan aspek keadilan pada pemberian bantuan dana PKH.
2.	Riza Pani, <i>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten</i>	Sama-sama ingin mendeskripsikan tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat.	Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

	<i>Indragiri Hulu menurut Ekonomi Syariah</i> , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.		deskriptif.
3.	Rika Wati, <i>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)</i> , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.	Sama-sama ingin mendeskripsikan tentang implementasi Program Keluarga Harapan untuk kesejahteraan masyarakat.	Pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada pelaksanaan dan hambatan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan pada penelitian sekarang lebih berfokus pada mekanisme dan aspek keadilan pada pemberian bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH).